

e-news letter

DES | 2019

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATENTIF

FRAKSI PARTAI KADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Drh. SLAMET

Bentuk **PANSUS** Pemusnahan Ribuan Ton Beras!

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG OTORITER MENURUT TEMUAN BPK 2019

“Hal ini sudah disampaikan dalam laporan temuan BPK tahun 2019 dan terjadi ketika pemerintah secara otoriter menerapkan dua kebijakan aneh,” tegas Slamet.

- 1** Kemendag memerintahkan Bulog mengimpor beras disaat stok beras masih penuh karena Bulog baru saja membeli beras dari petani.
- 2** Setelah Bulog mengimpor beras, Pemerintah merubah kebijakan Rastra menjadi BPNT sehingga beras tidak bisa langsung dikirim ke daerah, itu artinya uang yang pemerintah berikan ke rakyat tidak dibelikan beras oleh rakyat, tidak tepat sasaran,

Bentuk PANSUS Pemusnahan Ribuan Ton Beras

“Atas kejadian itu saya berencana mengusulkan dibentuk pansus. Biar ada titik terang terkait stok beras untuk masa yang akan datang



drh. SLAMET
Anggota Komisi IV DPR RI



BIN dan Kepolisian Harus Tingkatkan Pengamanan Jelang Natal dan Tahun Baru



Jakarta (03/12) -- Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, ikut prihatin atas kejadian ledakan di Monas Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019), yang menyebabkan 2 anggota TNI Serka Fajar dan Kopka Gunawan terluka.

"Saya mendoakan semoga beliau berdua lekas pulih kembali," ucap Sukamta.

Sukamta yang juga Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini kemudian menyampaikan bahwa ledakan di Monas harus diusut tuntas.

"Peristiwa ledakan di Monas harus diusut tuntas oleh kepolisian dan diungkap aktor-aktor intelektual beserta motif yang mereka bawa. Bangsa Indonesia tidak mentoleransi segala macam kekerasan apapun alasannya," ujar Sukamta lebih lanjut.

Ia melanjutkan pernyataannya bahwa pada Desember ada peristiwa yang berlangsung serentak di seluruh dunia yaitu Natal dan Tahun Baru 2020.

Peristiwa ledakan di Monas harus diusut tuntas oleh kepolisian dan diungkap aktor-aktor intelektual beserta motif yang mereka bawa. Bangsa Indonesia tidak mentoleransi segala macam kekerasan apapun alasannya

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Menjelang Natal dan Tahun Baru 2020, Badan Intelijen Negara harus meningkatkan early warning system terhadap ancaman keamanan yang akan muncul

agar bisa dicegah. Selain itu kepolisian harus memperkuat pengamanan khususnya di gereja dan tempat keramaian malam tahun baru," tegas legislator asal Yogyakarta ini.

DPR Minta KPI Fokus Awasi Tayangan Tak Bermoral

“Kita sebagai orang tua, tidak bisa mengawasi anak-anak secara intensif, orang tua memiliki waktu terbatas, tidak bisa mengawasi anak-anak sepanjang waktu”

KH TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (04/12) — Anggota Komisi I DPR RI Thoriq Hidayat dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyampaikan bahwa pada saat ini sebagian tayangan televisi tidak mendidik, hanya mementingkan aspek hiburan semata dan mengejar rating.

Anggota DPR RI Dapil Tasikmalaya, Kota Garut dan Kabupaten Garut ini menyampaikan bahwa anak-anak kita, kini disuguhi dengan tayangan yang merusak moral.

“Kita sebagai orang tua, tidak bisa mengawasi anak-anak secara intensif, orang tua memiliki waktu terbatas, tidak bisa mengawasi anak-anak sepanjang waktu”, tambahnya.

Thoriq menambahkan hal ini bertentangan dengan UU no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

“Selama ini yang dilakukan oleh KPI pusat dalam menghadapi hal ini, adakah strategi untuk mengatasi siaran ke

depan”, katanya.

Legislator PKS ini menyatakan juga bahwa pemberian sanksi berupa denda perlu ditegakkan. Terkait pemberian sanksi ini, antara sanksi dengan tingginya rating tidak seimbang dan tidak ada efek jera.

“Revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu dilakukan sehingga kami berharap kewenangan KPI bisa ditambah”, tutupnya.





Kelancaran Pilkada Tergantung Akurasi Data Pemilih

Jakarta (03/12) — Dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, BAWASLU, Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Dukkapil Kemendagri (2/12), Surahman Hidayat anggota DPR RI Fraksi PKS komisi 2 mengingka

kan pentingnya akurasi data pemilih, kelancaran pelaksanaan Pilkada ditentukan bagaimana masyarakat mendapatkan hak pilihnya.

Menurut Surahman, data pemilih ganda dan banyaknya masyarakat yang tidak terdata sebagai pemilih, menjadi faktor kegaduhan dalam pilkada.

"Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, dimulai sejauh mana kredibilitas pelaksanaan pilkada", ujarnya.]

Surahman melanjutkan prinsip dasar yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh ada masyarakat yang berhak tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Namun,

sebaliknya tidak boleh ada masyarakat yang tidak berhak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Sistem harus mempermudah masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya perlu kehati-hatian dalam melakukan pendataan pemilih serta ada ruang fleksibel bagi pemilih yang berhak, namun tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya", tutur Surahman.

Menurut putusan

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyebutkan hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin secara konstitusi, maka

penghilangan hak memilih merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Surahman Hidayat melihat, permasalahan data pemilih yang masih

"Sistem harus mempermudah masyarakat yang berhak menggunakan hak pilihnya, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya perlu kehati-hatian dalam melakukan pendataan pemilih serta ada ruang fleksibel bagi pemilih yang berhak, namun tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya

Dr. KH SURAHMAN HIDAYAT, MA

Anggota Komisi II DPR RI

terjadi saat ini, memperlihatkan lemahnya kinerja penyelenggara pemerintahan dan

penyelenggara pemilu level nasional ataupun daerah.

"Pemerintah sudah berinvestasi besar dalam E-KTP, sepatutnya masalah pendataan kependudukan sudah dapat diselesaikan. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum seharusnya menjadikan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) yang berasal dari rekap E-KTP sebagai basis data pemilih, walaupun dalam undang-undang posisi DP4 hanya sebatas pertimbangan", ungkapnya.

Permasalahan data pem

ilih menurut Surahman, merupakan ujian demokrasi dan berbangsa kita, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang besar dan sejahtera, masalah pendataan pemilih saja tidak bisa diselesaikan sampai sekarang.

"Aneh jika masalah ini tidak bisa kita selesaikan dan senantiasa muncul dalam setiap kali pelaksanaan pemilu level nasional ataupun pemilihan kepala daerah", tutup Surahman.



Habib Aboe Tak Mau Amandemen UUD Utak-atik Masa Jabatan Presiden



BANJARMASIN - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menyatakan peluang amendemen UUD NRI 1945 masih terbuka. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, Amerika Serikat saja sudah 30 kali mengamendemen konstitusinya, sedangkan UUD 1945 baru empat kali direvisi.

"Pada prinsipnya peluang untuk melakukan amendemen pada UUD 1945 masih

terbuka," kata Aboe saat Sosialisasi Empat Pilar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (6/12).

Hanya saja, Habib Aboe - panggilan akrabnya - menegaskan bahwa amendemen yang akan dilakukan pada UUD 1945 tidak boleh hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Menurut dia, tidak elok kalau amendemen cuma buat mengurus perpanjangan

masa jabatan presiden, sementara masih banyak hal substansi yang mesti diperbaiki.

"Tak elok rasanya jika amendemen UUD 1945 hanya ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tentunya hal yang sangat urgen dan substansi yang mendasar saja yang diubah," ujar Habib Aboe menjawab pertanyaan masyarakat saat sosialisasi terkait isu amendemen untuk memperpanjang masa jabatan.

Politikus kelahiran 1964 yang berulang tahun setiap 15 Oktober itu menegaskan, pembatasan masa jabatan presiden adalah bagian dari semangat reformasi. Karena itu ketika UUD 1945 diamendemen pada 1998, pembatasan jabatan presiden termasuk isu prioritas.

Arkian, masa jabatan presiden dibatasi dua periode saja. "Karena itu perlu banyak pertimbangan kalau hendak mengubah kembali pasal tersebut," ujarnya mengingatkan.

Menurut Aboe, isu strategis yang layak untuk dibahas dalam amendemen adalah garis besar haluan negara (GBHN). Sebab, ujar Aboe, ketiadaan GBHN telah menimbulkan banyak dampak pada pembangunan.

"Jadi, banyak dampak akibat tidak adanya GBHN, yaitu kurang terarahnya orientasi pembangunan nasional untuk jangka panjang. Hal ini tentunya perlu segera untuk diperbaiki," pungkas legislator dari daerah pemilihan I Kalimantan Selatan itu. (boy/jpnn)

Foro : dpr.go.id

Tak elok rasanya jika amendemen UUD 1945 hanya ditujukan untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Tentunya hal yang sangat urgen dan substansi yang mendasar saja yang diubah

**HABIB
ABOE BAKAR
ALHABSYI, SE**

Anggota Komisi III DPR RI



Langkah Bu Mega, memulangkan Prabowo sangat simpati. Karena itu tidak ada alasan jika Pak Jokowi tidak mengikuti sikap kenegarawan Bu Mega. "Cara Bu Mega tentunya patut di contoh Pak Jokowi dalam upaya menyelamatkan dan memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag M.Si.

Anggota Komisi III DPR RI

Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengapresiasi dan memuji langkah Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI kelima telah menyelamatkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dari stateless atau tanpa kewarganegaraan." Apa yang dilakukan Bu Mega kepada

PKS: Jokowi Diminta Tiru Megawati untuk Pulangkan Habib Rizieq

Prabowo adalah tindakan terpuji dan patut ditiru. Saat itu Ketua Umum PDIP itu menunjuk dirinya seorang negarawan" ungkap Nasir.

Sebagaimana diketahui, Megawati yang saat itu menjabat Presiden kelima sempat memarahi Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena membuat Prabowo terlantar. Prabowo saat itu berhenti dari dinas di TNI pada 1998, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania. Dan keduanya kini bersahabat.

Lebih lanjut Nasir setuju apa yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut yang mengatakan tidakannya menyelamatkan Prabowo sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila." Beliau (Megawati-red) telah menunjukkan sikap Pancasila, karena memang begitulan seharusnya kita mengimplementasikan nilai Pancasila, yakni merangkul seluruh warga negara Indonesia meski ada perbedaan pandangan politik" ungkap Nasir

Belajar dari Megawati

Soekarnoputri, Nasir Djamil mengajak agar Presiden Jokowi meniru langkah Megawati agar dapat memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) yang saat kondisinya terkatung-katung di Saudi Arabia. Langkah Bu Mega, lanjut Nasir, memulangkan Prabowo sangat simpati. Karena itu tidak ada alasan jika Pak Jokowi tidak mengikuti sikap kenegarawan Bu Mega. "Cara Bu Mega tentunya patut di contoh Pak Jokowi dalam upaya menyelamatkan dan memulangkan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia.", ujar Nasir

Lebih lanjut Nasir menyayangkan sikap yang ditunjukkan aparat dan pejabat saat ini justru memusuhi HRS bahkan memperkeruh suasana."jika memang Pemerintah ingin serius mengimplementasikan Pancasila secara utuh, seharusnya tidak muncul pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang memperkeruh suasana, seperti yang

disampaikan Menteri Koordinator Politik,Hukum dan HAM belakangan ini, tetapi seharusnya HRS dirangkul dan diselamatkan dari ancaman stateless, karena bagaimanapun HRS adalah warga negara yang taat dan berpengaruh besar bagi umat di republik ini" Tegas Nasir.

Foto : dpr.go.id





Ada dua hal perlu didalami dalam pansus tersebut. Pertama, kata dia, apa tanggung jawab Kemendag atas kerugian Bulog, karena memerintahkan Bulog mengimpor beras padahal stok masih cukup.

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (02/12) — Rencana pemusnahan cadangan beras sebanyak 20 ribu ton oleh Perum Bulog mengundang perhatian anggota DPR RI Fraksi PKS, Slamet.

Slamet mengatakan pemusnahan tersebut dinilai sebagai pemborosan anggaran negara setara dengan nilai Rp 160 miliar yang dilakukan negara.

"Ini perlu pengkajian lebih komprehensif oleh negara. Jangan sampai uang negara mubazir begitu saja," ujar Slamet kepada media.

Menurutnya, pemerintah seyogyanya berpikir lebih jernih dan realistis untuk bisa keluar dari masalah tersebut.

"20 ribu ton beras yang akan dimusnahkan tersebut berusia diatas 1 tahun", ungkapnya.

Selain itu, kata dia, masih

Pemusnahan Puluhan Ribu Ton Beras oleh Bulog, DPR Minta Pansus Dibentuk

ada 100 ribu ton beras berusia diatas 4 bulan yang mungkin juga akan busuk.

"Hal ini sudah disampaikan dalam laporan temuan BPK tahun 2019 dan terjadi ketika pemerintah secara otoriter menerapkan dua kebijakan aneh," tegasnya.

Pertama, lanjut Slamet, Kemendag memerintahkan Bulog mengimpor beras disaat stok beras masih penuh karena Bulog baru saja membeli beras dari petani.

"Kedua, yaitu Setelah Bulog mengimpor beras, Pemerintah merubah kebijakan Rastra menjadi BPNT sehingga beras tidak bisa langsung dikirim ke daerah, itu artinya uang yang pemerintah berikan ke rakyat tidak dibelikan beras oleh rakyat, tidak tepat sasaran," tegasnya.

Menurut Slamet, dalam laporan BPK dari SPI (Satuan Pemeriksa Internal) Bulog disebutkan jumlah beras yang tidak tersalur sebanyak 769 ribu ton lebih atau senilai Rp 7 triliun lebih.

"Over stok ini disebabkan

Bulog mengimpor beras tahun 2018 sebanyak 1,8 juta ton atas perintah Kemendag. Padahal stok cukup dan Bulog tidak mengirim beras Rastra ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat) karena pemerintah (Kemenkeu) merubah kebijakan menjadi BPNT," tuturnya.

Sementara itu, lanjut Slamet, KPM BPNT setelah menerima uang tidak membeli beras ke Bulog tapi ketempat lain, sehingga beras Bulog tidak tersalurkan.

"Apa saran Bulog atas 20 ribu ton beras busuk ini apakah bisa dijual untuk pakan ternak? Daripada dibuang begitu saja?," tanya Slamet.

Selain itu, Slamet melanjutkan, ada stok sekitar 100 ribu ton yang akan terjadi di depan. Pihaknya berharap Bulog berpikir kreatif tentang kebermanfaan tan

stok tersebut.

"Baiknya Bulog berpikir kreatif dimanfaatkan beras yang sudah tidak layak konsumsi tersebut dari pada sekedar dimusnahkan," lugasnya.

"Atas kejadian itu saya berencana mengusulkan dibentuk pansus. Biar ada titik terang terkait stok beras untuk masa yang akan datang," tegas Slamet.

Menurut Slamet, dibentuknya pansus diperlukan supaya bisa memanggil

Kemendag dan Kemenkeu.

Menurut Slamet, Ada dua hal perlu didalami dalam pansus tersebut. Pertama, kata dia, apa tanggung jawab Kemendag atas kerugian Bulog, karena memerintahkan Bulog mengimpor beras padahal stok masih cukup.

"Selanjutnya, perlu dipertanyakan ke Kemenkeu mengapa membuat kebijakan BPNT disaat beras di Bulog sedang over stok," tutup Slamet



Perbaiki Sampah Laut

Masalah Lingkungan dan Energi Nasional Terselesaikan

Jakarta (02/12) — Anggota DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mendukung rencana pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan persoalan sampah laut.

Menurutnya, ketika Indonesia mampu mengendalikan sampah laut dengan 2 tujuan sekaligus, memperbaiki ekosistem pantai dan memproduksi energi dari bahan baku sampah, maka akan menjadi prestasi Indonesia di mata dunia pada upaya mengatasi persoalan lingkungan di laut.

"pada tahun 2016, Forum Ekonom Dunia, menemukan fakta di lapangan bahwa, ada

150 juta ton plastik di samudra bumi ini", ungkapnya.

Akmal menambahkan jumlah plastik yang tumpah dari daratan ke laut, setiap tahunnya sebesar 8 juta ton. Ketika plastik tidak terurai dalam jangka ratusan tahun, akumulasi ini tak terbendung bila tidak ada upaya penyelamatan dari manusia.

"Laut ini sudah bisa bersih aja terutama pantai-pantainya sudah sangat bagus, apalagi

bila mampu sampahnya diubah menjadi energi tenaga sampah, akan menjadi prestasi yang luar biasa di dunia internasional", ucap Akmal.

Legislator Sulawesi Selatan II ini menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2005, menjadi negara penghasil sampah terbesar di Dunia dengan jumlah produksi sampah sebesar 66-67 ton per tahun. Sedangkan pada tahun ini, 2019, sebuah lembaga peneliti Internasional merilis Indonesia penyumbang sampah laut terbesar kedua setelah China.

"Publikasi Indonesia sebagai penyumbang sampah laut terbesar ke dua dipaparkan pada jurnal berjudul Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean. Penghasil sampah laut terbesar secara berurutan China sebesar 262,9 juta ton sampah, Indonesia (187,2 juta ton), Filipina (83,4 juta ton), Vietnam (55,9 juta ton), dan Sri Lanka (14,6 juta ton)", urai Akmal.

Menurut Akmal, Fraksi PKS tempat ia bernaung sedang

mengusulkan revisi RUU penanganan sampah. Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu penguatan sisi regulasi menjawab persoalan sampah yang semakin kompleks.

"Ini sejalan dengan program pemerintah kedepan sekaligus mengkomodir banyak ide dari berbagai forum untuk mengatasi persoalan Lingkungan dan Energi sekaligus", tuturnya.

Bila kegiatan penanganan sampah laut ini serius ditangani lintas sektoral, kata Akmal, bukan hal mustahil Indonesia mampu mengatasi persoalan sampah terutama sampah laut yang berimplikasi pada pengembalian kualitas ekosistemnya.

"Saya berharap program penanganan sampah laut ini bukan sekedar lips service pemerintah untuk pencitraan saja. Program ini sangat bagus dan perlu

dukungan semua pihak. Menjawab tantangan energi dari sampah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan kawasan pantai dan laut akan menjadi prestasi mengagumkan di mata dunia", pungkas Andi Akmal Pasluddin.

Foto : dpr.go.id

Saya berharap program penanganan sampah laut ini bukan sekedar lips service pemerintah untuk pencitraan saja. Program ini sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Menjawab tantangan energi dari sampah sekaligus mengatasi persoalan lingkungan kawasan pantai dan laut akan menjadi prestasi mengagumkan di mata dunia

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP.,MM

Anggota Komisi IV DPR RI



Pemerintah Diminta Cepat Sikapi Beras Bulog Terancam Busuk

Beras CBP itu pemiliknya pemerintah. Karena itu pemerintah juga yang harus mengambil keputusan mau diapakan beras tersebut

**Dr. HERMANTO,
SE., MM**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (4/12) — Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto meminta Pemerintah agar cepat mengambil keputusan atas laporan adanya 20.000 ton beras Bulog yang terancam busuk.

Hermanto mengatakan beras itu adalah cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan oleh Bulog.

"Beras CBP itu pemiliknya pemerintah. Karena itu pemerintah juga yang harus mengambil keputusan mau diapakan beras tersebut," papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (4/12).

Bulog melaporkan, stok 20.000 ton CBP mengalami turun mutu atau terancam busuk. Stok tersebut telah disimpan atau tak disalurkan selama lebih dari empat bulan.

Terhadap beras ini, kata Hermanto, Bulog menyebutkan beberapa opsi untuk menyikapinya. Pertama, jika dinyatakan masih layak konsumsi maka bisa dijual dengan harga murah. Kedua, dialihfungsikan menjadi tepung

atau pakan ternak. Ketiga, jika tidak layak untuk pangan maupun pakan maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol.

"Ambil keputusan segera, jangan menunggu beras tersebut benar-benar busuk," tandas legislator dari FPKS ini.

Jika Pemerintah bingung mengambil keputusan langsung atas beras tersebut, Hermanto menyarankan agar pemerintah membuat keputusan menyerahkan sepenuhnya penanganan beras tersebut kepada Bulog.

"Saya yakin Bulog akan membuat yang terbaik untuk beras tersebut", pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini.



"Saya sudah sampai-
kan ini kepada Direk-
tur Jasa Marga dan
Kepala BPJT. Tapi
kayaknya di lapangan
tidak ada action
karena sudah direstui
oleh Pak Menteri

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI



KOMISI V

Fraksi.pks.id | Selasa 03 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

© fraksipksdprri

@fkskdprri

fraksi.pks.id



DPR Minta Kementerian PUPR Batalkan Kenaikan Tarif Tol

Jakarta (03/12) — Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif jalan tol yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Sigit menengarai sejumlah tarif jalan tol melanggar ketentuan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan baik dari besaran tarif maupun waktu kenaikannya yang belum 2 tahun.

"Semalam saya lewat tol Surabaya-Jakarta. Sebelum lebaran, tarifnya sekitar Rp 570 ribu untuk mobil kecil. Sekarang sudah naik menj

adi Rp 670 ribu. Apa betul ada kenaikan? Kalau ada kenaikan ini kan belum dua tahun.

Kenaikan itu harus merujuk undang-undang. Saya juga mengamati ada kenaikan dari Gerbang Cibatu ke Cikarang Barat dari Rp 2500 menjadi Rp 12 ribu dan beberapa ruas lainnya. Ini akan memberatkan masyarakat dan melanggar UU. Tolong yang seperti ini dibatalkan, Pak Menteri," kata Sigit dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kemenhub, BMKG, Basarnas dan Polri membahas persiapan transportasi Natal dan Tahun Baru 2020, Senin, (02/12/2019).

Kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sigit mengaku sudah menyampaikan secara langsung keberatannya mengenai kenaikan tarif tol yang tidak sesuai UU Jalan kepada Kepala BPJT beberapa waktu lalu. Namun, belum ada tindak lanjut sampai saat ini.

"Saya sudah sampaikan ini kepada Direktur Jasa Marga dan Kepala BPJT. Tapi kayaknya di lapangan tidak ada action karena sudah

direstui oleh Pak Menteri. Melalui rapat ini saya ingin kembali menyampaikan agar kenaikan ini dibatalkan. Karena kualifikasi UU Jalan di atas peraturan menteri dan sebagainya," kata Sigit.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pemerintah memberlakukan system penarifan terbuka untuk ruas tol Jakarta-Cikampek. Pemberlakuan tarif system terbuka ini menyebabkan pengguna jalan dengan jarak dekat harus membayar tarif merata (jarak jauh dekat sama) yaitu sebesar Rp 12.000.

"Formulasi penarifan seperti ini menyebabkan adanya kenaikan tarif tol yang melebihi ketentuan UU", ungkap Sigit.

Dalam pasal 48 dan penjelasan UU Jalan, kata Sigit, sudah ditetapkan formulasi evaluasi tarif tol yaitu Tarif baru adalah tarif lama ditambah inflasi (1+inflasi).

Sementara formulasi penarifan dengan system terbuka yang diterapkan Jasa Marga selaku operator tol Jakarta-Cikampek melebihi aturan tersebut. Bahkan kenaikannya ada yang

mencapai 10 kali lipat.

Selain laju inflasi, kenaikan tarif tol juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Di sisi lain, SPM jalan Tol Jakarta-Cikampek kerap tidak terpenuhi karena kemacetan.

Batalkan Kenaikan Tarif Tol



*"Saya sudah sampaikan ini kepada
Direktur Jasa Marga dan Kepala BPJT. Tapi
kayaknya di lapangan tidak ada action
karena sudah direstui oleh Pak Menteri*

Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO

Anggota Komisi V DPR RI

Lindungi Petani Karet, Syahrul Aidi Minta Semua Jalan Negara Gunakan Unsur Karet



Jakarta (03/12) — Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi menyambut baik rencana pemerintah untuk mencampur aspal dengan karet dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan jalan baik

nasional maupun daerah.

Menurut Syahrul Aidi, rencana pemerintah mencampur aspal dengan karet adalah ide yang sangat bagus. Selain meningkatkan kualitas jalan, juga meningkat

perekonomian masyarakat khususnya petani karet.

Hal ini disampaikan Syahrul Aidi dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri PUPR, Kemenhub, Basarnas, BMKG dan Kakorlantas Polri dalam persiapan peningkatan infrastruktur mudik natal 2019 di Komplek DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (2/12).

"Saya mendengar kemaren rencana pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk membangun jalan daerah. Saya juga dapat informasi sudah dicoba oleh Kementerian PUPR lebih kurang 93 kilometer jalan aspal dengan campuran karet," katanya.

Untuk itu, Syahrul mendorong pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk secepatnya menerbitkan peraturan menteri (Permen) atas rencana tersebut.

"Untuk itu kami meminta Pak Menteri untuk membuat peraturan menteri (permen) agar seluruh jalan di Indonesia ini dicampurkan dengan karet, kalau memang hasil penelitiannya dengan cara itu hasil kualitas jalannya jauh lebih baik," tambah politisi PKS itu.

Jadi efeknya sangat luar biasa, selain kualitas jalan kita baik juga ekonomi masyarakat kita di Sumatera khususnya Riau sangat baik. Tapi sekarang ini belum ada regulasinya. Tapi kalau sudah ada regulasi dalam bentuk Proses atau Permen ini sangat baik,

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., MA.

Anggota Komisi VI DPR RI / Dapil Riau II

Syahrul menuturkan, jika rencana ini direalisasikan pemerintah dengan menyebutkan regulasi. Maka efeknya sangat luar biasa, baik dari kualitas jalan baik juga secara ekonomi masyarakat khususnya daerah penghasil karet seperti Sumatera juga akan jauh lebih baik.

"Jadi efeknya sangat luar biasa, selain kualitas jalan kita baik juga ekonomi masyarakat kita di Sumatera khususnya Riau sangat baik. Tapi sekarang ini belum ada regulasinya. Tapi kalau sudah ada regulasi dalam bentuk Proses atau Permen ini sangat baik," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah

terengah berupaya menyerap karet dengan memanfaatkannya sebagai bahan campuran aspal untuk pembangunan jalan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan karet yang digunakan bukan karet mentah. Karet yang digunakan untuk campuran aspal adalah crumb rubber atau karet remah.

Foto :
dpr.go.id

“Pemerintah harus segera menghentikan membuka pembanguan semen asing/dari luar negeri dengan kata lain melakukan moratorium, dan juga membuka akses dan peluang untuk Indonesia bisa mengekspor semen ke luar negeri

MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (04/12) — Kabinet Indonesia Maju harus menjadikan isu Penyelamatan Industri Semen Dalam Negeri, menjadi isu penting. Karena Industri Semen Dalam Negeri menyerap banyak tenaga kerja.

Jangan sampai Industri Semen Dalam Negeri mengalami hal sama dengan Industri Baja Dalam Negeri, yang sangat ini juga megap-megap. Yang penyebabnya bisa dianggap sama, yaitu membanjirnya Produk sejenis dari luar negeri dengan kata

Pemerintah Harus Selamatkan Industri Semen Dalam Negeri

lain produk impor dan berdirinya pabrik semen baru yang merupakan perusahaan dari luar negeri. Karena dengan kebijakan pembukaan kran impor dan munculnya pabrik-pabrik baru, ditambah over supply di dalam negeri. Nantinya akan mematikan Industri semen domestik, akhirnya semen impor yang menguasai pasar dalam negeri.

Demikian pernyataan dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mahfudz Abdurrahman di Senayan Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019

“pelaku Industri Semen Dalam Negeri sudah pada teriak, mereka sudah kerepotan. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus berupaya menyelamatkan industri semen dalam negeri. Mereka menyerap tenaga kerja yang besar, membayar pajak dan juga memberikan dampak ekonomi disekitarnya”.

Mahfudz mengatakan persoalan over supply semen dalam negeri yang informasinya sudah mencapai 43 Juta Ton/Tahun.

“Pemerintah harus segera mengentikan membuka

pembangunan semen asing/dari luar negeri dengan kata lain melakukan moratorium, dan juga membuka akses dan peluang untuk Indonesia bisa mengekspor semen ke luar negeri”, ungkapnya.

“Menko Perekonomian jangan berdiam diri, harus segera mengkoordinasikan jajaran terkait, untuk mencari solusi terbaiknya”. Lanjut Mahfudz Abdurrahman

Mahfudz Abdurrahman selanjutnya menyatakan kami berharap Presiden juga memberikan atensi terkait persoalan semen dalam negeri, apalagi pemerintah sangat giat dalam membangun infrastruktur di Indonesia, ini tentu juga peluang untuk menyerap semen lebih banyak lagi, tapi saat ini saja sudah kelebihan pasokan lebih 40 juta ton.

“dan kalau tidak ada langkah-langkah drastis. Bukan tidak mungkin industri semen dalam negeri akan semakin lesu. pabrik semen akan menurunkan tingkat produksinya, yang ujungnya akan terjadi PHK karyawannya dan pada akhirnya akan jadi beban pemerintah juga”,



paparnya.

Mahfudz menegaskan koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan harus diperbaiki, karena dampak yang terjadi saat ini adalah imbas dari kebijakan pemerintah dan memperbaikinya juga harus dengan kebijakan pemerintah.

“jangan hanya mengedepankan ego dan

kepentingan sektoral, tapi harus mengedepankan Kepentingan Nasional/national interest. Sekali lagi kami meminta Menko Perekonomian untuk segera merumuskan langkah strategis untuk menyelamatkan Industri Semen Dalam Negeri. Dan kami di Komisi VI DPR RI menunggu langkah strategis itu”, tutup Mahfudz Abdurrahman.

"Jiwasraya ini seharusnya jangan sampai rugi. Karena startnya sudah sangat bagus dengan 17 ribu nasabah dimana nasabah membayar Rp 100 juta di awal.

Premi asuransi itu mestinya mampu memberikan kinerja perusahaan yang baik dalam waktu singkat",

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (06/12) — Pada RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Komisi VI dengan Jiwasraya, anggota DPR RI, Nevi Zuairina mendesak Kementerian BUMN agar Jiwasraya segera membayar kewajibannya kepada nasabah pemegang polis.

Menurut Nevi optimalisasi aset yang dimiliki untuk memperoleh dana segar dengan mengambil langkah re-engineering finance yaitu dengan melakukan underlying untuk penerbitan instrumen investasi Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berupa Dana Investasi Real Estate (DIRE).

"Jiwasraya ini seharusnya jangan sampai rugi. Karena startnya sudah sangat bagus dengan 17 ribu nasabah dimana nasabah membayar Rp 100 juta di awal. Premi asuransi itu mestinya mampu

KOMISI VI

Fraksi.pks.id | Jum'at 06 Desember 2019

Fraksi PKS DPR RI

fraksipksdprri

@fpksdprri

fraksi.pks.id



DPR Desak Jiwasraya Segera Lunasi Hak Pemegang Polis

memberikan kinerja perusahaan yang baik dalam waktu singkat", ucap nevi

Nevi mengatakan, pada kenyataannya asuransi ini malah terjadi persoalan besar ketika klaimnya jatuh tempo pada Oktober 2018 dengan nilai tunai polis mencapai Rp 802 miliar yang berasal dari 711 polis yang harus dibayarkan kepada tujuh mitra bancassurance Jiwasraya antara lain Standard Chartered Bank, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Victoria, Bank ANZ, Bank QNB Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan juga BTN.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini mendapat laporan bahwa Jiwasraya berinvestasi hingga Rp 6,3 triliun untuk saham PT Inti Agri Resources lewat reksa dana. Menurut catatan BPK investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar ini bisa menimbulkan potensi gelembung (bubble). Harga saham Inti Agri akan melonjak terus walaupun keuangan perusahaan ini tidak begitu baik kondisi yang berpotensi merugikan Jiwasraya.

Berdasarkan Laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun pemeriksaan 2016, tambahnya, telah dideteksi

investasi yang tak wajar, yakni pembelian saham PT Trikomsel Oke Rp 449,5 miliar, PT Sugih Energy Rp 318,1 miliar, dan PT Eureka Prima Jakarta Rp 118 miliar. BPK menilai pembelian saham-saham ini kurang cermat karena fundamental perusahaan itu sebetulnya kurang bagus. Untuk laporan keuangan 2017, nilai aset properti Jiwasraya mencapai Rp 6,55 triliun.

"Laporan unaudited Jiwasraya tahun 2017 awalnya mencatat laba bersih sebesar Rp 2,4 triliun. Namun, setelah manajemen lama lengser, PricewaterhouseCoopers (PWC) merevisi auditnya. Hasilnya laba bersih Jiwasraya mencium menjadi Rp 360 miliar saja", Urai Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan, dari catatan rapat-rapat DPR, antara Komisi VI DPR dengan Asuransi Jiwasraya, pada Selasa 23 Juli 2019, dibahas soal tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis. Dengan nilai bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp 96,58 miliar, Jiwasraya berkomitmen melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020.

Nevi menerangkan, bahwa Jiwasraya tercatat mengalami ekuitas minus Rp 24 triliun per September 2019. Kebutuhan dana Rp 32,89 triliun diperlukan untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko (RBC) sesuai ketentuan otoritas yakni 120%. Ekuitas negatif terjadi karena beberapa penyebab, di antaranya perusahaan banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi. Pada tahun lalu, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45.

Sementara itu 59,1% atau Rp 14,9 triliun ditempatkan pada reksa dana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Selain itu, ada temuan rekayasa harga saham. Modusnya, Jiwasraya membeli saham dengan harga mahal kemudian dijual pada harga negosiasi (di atas harga perolehan) kepada manajer investasi, untuk kemudian dibeli Jiwasraya.

"Sebagai pengawas kinerja

pemerintah, kami FPKS akan meminta Kementerian BUMN dan Aparat penegak hukum agar menindaklanjuti adanya indikasi kecurangan (fraud) di tubuh Jiwasraya. Ini juga ada campur tangan pemerintah untuk memastikan agar nasabah Jiwasraya dapat dibayar. Pemerintah perlu membentuk lembaga penjamin polis, agar kasus gagal bayar polis asuransi tidak terulang kembali, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian", tutup nevi Zuairina.



PKS Jalin Kerjasama Dengan Partai Islam Terbesar di Bosnia



Bosnia Herzegovina - Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Aljufri didampingi Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini baru-baru ini bertemu dengan tokoh Partai Islam terbesar Bosnia, Party of Democratic Action, di Sarajevo (29/12). Kunjungan ini adalah rangkaian dari diplomasi internasional Fraksi PKS DPR ke Fraksi-Fraksi Partai di dunia yang selama ini telah berjalan, antara lain ke Rusia, AS, Inggris, Australia, dll.

Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, ia mendampingi Ketua Majelis Syuro bertemu dengan Mr. Semsudin

Mehmedovic, Anggota Parlemen sekaligus salah satu tokoh pendiri dari Partai Islam terbesar di Bosnia Herzegovina Party of Democratic Action. Turut mendampingi dalam pertemuan penuh kehormatan dan persahabatan itu, Duta Besar Indonesia untuk Bosnia Herzegovina Amelia Ahmad Yani yang juga merupakan putri ketiga Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani.

"Pertemuan berlangsung sangat hangat dan bersahabat karena Indonesia dan Bosnia punya hubungan spesial. Terutama sejak negara ini dilanda konflik etnis dulu,

Indonesia memberi dukungan penuh terhadap nasib etnis muslim Bosnia sebagai rakyat yang tertindas saat itu. Alhamdulillah Bosnia-Herzegovina saat ini hidup dalam kedamaian," ungkap Jazuli.

Dalam pertemuan itu, lanjut Jazuli, Ketua Majelis Syuro PKS mengajak Mr. Semsudin Mehmedovic untuk lebih mempererat ikatan persaudaraan dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang utamanya di bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata dan budaya. Baik dilakukan secara 'government to government', 'business to business', juga 'people to people' bahkan 'party to party' seperti yang dilakukan antara PKS dan Party of Democratic Action.

PKS mengapresiasi peran Partai Islam Bosnia, Party of Democratic Action, dalam memperkuat kohesi sosial diantara warga negara Bosnia-Herzegovina yang plural dan majemuk karena dibentuk dari tiga entitas etnis bangsa yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia dengan penduduk mayoritas beragama Islam lalu disusul Nasrani (Kristen Orthodox dan

PKS menawarkan Indonesia sebagai contoh dan pelajaran kerukunan dalam bangsa yang majemuk baik dari sisi suku bangsa, budaya, maupun agama. Bagaimana pentingnya membangun kohesivitas sosial melampaui perbedaan yang ada, bahkan kemajemukan bisa menjadi kekayaan bangsa sejalan dengan semboyan bhinneka tunggal ika

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Katolik). Ada juga minoritas Yahudi dan nonagamis.

"PKS menawarkan Indonesia sebagai contoh dan pelajaran kerukunan dalam bangsa yang majemuk baik dari sisi suku bangsa, budaya, maupun agama. Bagaimana pentingnya membangun kohesivitas sosial melampaui perbedaan yang ada, bahkan kemajemukan bisa menjadi kekayaan bangsa sejalan dengan semboyan bhinneka tunggal ika," kata Jazuli.

Mr. Semsudin sebaliknya juga mengapresiasi jalinan persahabatan rakyat dan

negara Indonesia selama ini terhadap Bosnia yang luar biasa. Untuk itu beliau mengucapkan terima kasih dan salam hangat untuk rakyat dan pemimpin Indonesia.

Terima Pejabat Kedubes Australia

Fraksi PKS ajak Perkuat Kerjasama dan Promosikan Perdamaian dunia

Fraksi PKS membuka kerjasama yang lebih erat dengan mitra di Australia dan lebih dari itu mengajak Australia sebagai negara besar di kawasan untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dunia dan pembelaan terhadap warga dunia yang tertindas dan teraniaya atas nama kemanusiaan dan keadilan,

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (3/12) - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerima kunjungan pejabat dari Kedutaan Besar Australia Dr. Dave Peebles (Minister-Counsellor, Kepala Bidang Komunikasi dan Politik) dan Boyd Whalan (Second Secretary) pada Selasa di Komplek DPR Senayan (3/12).

"Fraksi PKS dengan tangan terbuka menerima kunjungan pejabat Kedutaan Besar Australia untuk mempererat komunikasi dan bertukar pikiran tentang kondisi dan perkembangan politik dua

negara," ungkap Jazuli.

Dalam pertemuan, lanjut Jazuli, Dave Peebles memastikan penguatan kerjasama dua negara Australia dan Indonesia pada level yang tertinggi dan menyambut baik setiap upaya memperkuat kerjasama baik G to G, B to B, maupun people to people.

Dave Peebles juga mengapresiasi Indonesia sebagai negara multikultural dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun dapat menjaga kerukunan antarumat beragama sehingga menjadi

tempat yang nyaman bagi warga negara asing yang berkunjung ke sini.

"Fraksi PKS sendiri melihat Australia sebagai negara besar dan negara maju yang terdekat dengan Indonesia. Kerjasama dengan Australia adalah keniscayaan yang strategis bagi Indonesia," kata Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, Fraksi PKS sudah beberapa kali bertukar pikiran dengan pejabat Australia. Bahkan Fraksi PKS telah melakukan kunjungan resmi ke Fraksi-Fraksi di Parlemen Australia dan sejumlah pihak di sana.

"Fraksi PKS membuka kerjasama yang lebih erat dengan mitra di Australia dan lebih dari itu mengajak Australia sebagai negara besar di kawasan untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dunia dan pembelaan terhadap warga dunia yang tertindas dan teraniaya atas nama kemanusiaan dan keadilan," pungkas Jazuli.



Stop Wacanakan Rencana Kenaikan Tarif Listrik

"Ide kenaikan tarif listrik tidak tepat. Hentikan wacana yang dilempar ke publik untuk menaikkan tarif listrik mulai 1 Januari 2020. Itu meresahkan

SAADIAH ULUPUTTY, ST.

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (01/12) — Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty meminta pemerintah untuk menghentikan wacana kenaikan tarif Listrik pada 1 Januari 2020.

Permintaan aleg asal PKS tersebut menyusul rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik pada berbagai kesempatan.

"Ide kenaikan tarif listrik tidak tepat. Hentikan wacana yang dilempar ke publik untuk menaikkan tarif listrik mulai 1 Januari 2020. Itu meresahkan", jelas Saadiah.

Rencana untuk menaikkan tarif listrik kata Saadiah, diawali adanya penetapan subsidi listrik dalam APBN Tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 54,8 triliun. Angka ini lebih rendah

dari APBN 2019, Rp 65,3 triliun.

"Dengan pengurangan subsidi ini, pelanggan 900 VA kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami beban kenaikan tarif", terang Saadiah.

Namun baginya, rencana kenaikan tarif listrik pada 1 Januari 2020 akan menyisakan masalah. Itu kado awal tahun yang tidak menggembirakan bagi rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus menahan diri dengan tidak menaikkan tarif listrik", harapnya.

Saadiah mengingatkan kenaikan tarif listrik selalu membawa efek ikutan berikutnya.

"Dampak kenaikan tarif listrik akan mendorong naiknya inflasi", sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Lebih parah, harga sembako juga akan ikut tergerek naik.

"Negara harus hadir. Kehadirannya dengan tidak memberi beban baru bagi rakyat. Efek ikutan naiknya tarif listrik dirasakan langsung oleh masyarakat", Saadiah berargumen.

Kenaikan tarif listrik akan semakin memperburuk kemampuan dan daya beli masyarakat. Dirinya sejalan dengan sikap Menteri ESDM, Arifin Tasfiry agar pelanggan listrik 900 VA rumah tangga mampu walaupun sudah disepakati tidak menerima subsidi masih perlu dipastikan agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, akurasi data ini penting. Pemerintah wajib menyediakan data yang valid dan terverifikasi untuk pelanggan 900 VA. Baik rumah tangga mampu dan kurang mampu.

Menghilangkan subsidi bagi pelanggan 900 VA RTM tidak harus berujung pada kenaikan tarif listrik. "Pemerintah harus berfikir tentang skema baru agar pelanggan 900 VA RTM tidak naik", katanya.

Kebijakan kompensasi menurutnya adalah satu skema. Sebab, data yang harus divalidasi ulang untuk pelanggan 900 VA RTM sangat signifikan.

"Pemerintah menyebut 17,23 juta pelanggan. Tapi Harus divalidasi ulang. Maka, rencana naiknya tarif listrik awal 2020 dihentikan wacananya", tutupnya.



DISKUSI PUBLIK

PERSEMBAHAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



LISTRIK Untuk **KESEJAHTERAAN RAKYAT**

HADIRILAH

SELASA

10 Desember 2019
Pk. 13.00 WIB - Selesai

Bertempat di Ruang Rapat Pleno
Fraksi PKS DPR RI

Gedung Nusantara I, Lantai 3.
Jl. Jend. Gatot Subroto,
Senayan, Jakarta

KEYNOTE SPEAKER

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

PEMBICARA

**Direktur Utama
PT. PLN (Persero) ***

**Dr. Agung Firman
Sampurna, SE. Msi ***
Ketua BPK RI

Sa'adiah Uluputty, ST
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS

Tulus Abadi, SH
Direktur Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia

MODERATOR

M. Sigit Cahyono, ST, M.Eng
TA Poksi VII Fraksi PKS



LIVE STREAMING

Youtube Live PKS TV DPR RI

Facebook Live Fraksi PKS DPR RI



FACEBOOK LIVE



YOUTUBE LIVE



Adanya Peraturan Menteri Agama soal Majelis Taklim justru bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (3/12) — Anggota Dewan dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, saat ditemui di kantornya mengatakan selama ini kegiatan majelis taklim telah berjalan dengan baik, dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi umat Islam, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang agama.

Anggota Komisi VIII ini melanjutkan, Hampir seluruh Majelis Taklim yang ada, dilaksanakan atas inisiatif dan partisipasi masyarakat. Sedikit sekali diantara majelis taklim yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pusat

PMA Majelis Taklim, Jadi Alat untuk Awasi Umat Islam

maupun daerah.

"Jadi, majelis taklim memiliki nilai positif dari segala sisinya. Tidak ada dampak negatif sama sekali yang ditimbulkan dari kegiatan majelis taklim. Kalau pun ada, maka sangat jarang, yaitu karena kesalahpahaman yang segera bisa diselesaikan," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Iskan, tidak ada kebutuhan sama sekali kepada peraturan yang mengatur kegiatan majelis taklim, sebab tanpa peraturan dan tanpa bantuan dana dari pemerintah pun majelis taklim sudah berjalan dengan baik.

"Peraturan ini mendapat penolakan keras dari semua ormas Islam yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan ormas-ormas Islam lainnya", pungkask Iskan.

Lebih lanjut Iskan mengatakan Kemenag tidak seharusnya merepotkan majelis taklim dalam aktifitas dakwahnya. Kemenaglah yang seharusnya mendata Majelis Taklim. Hal tersebut bisa dilakukan oleh aparatur Kemenag yang sampai ke tingkat Kecamatan.

"Bila alasannya adalah untuk memudahkan

memberikan bantuan, maka faktanya selama ini majelis taklim bisa hidup meskipun tanpa bantuan dari pemerintah." Ungkap legislator dari dapil Sumatera Utara ini.

Kegiatan majelis taklim, menurut Iskan, justru dapat meningkatkan spirit keislaman yang tinggi dan sangat positif untuk menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar.

"Adanya Peraturan Menteri Agama soal Majelis Taklim justru bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama", urainya.

Iskan melanjutkan, Jika hal itu terjadi maka akan sangat dimungkinkan munculnya konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah dengan masyarakat.

"PMA yang tujuannya untuk menguatkan peran strategis majelis taklim dalam memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam serta memperkuat ketahanan dan keutuhan NKRI,



namun dalam materinya, justru lebih bersifat politis untuk bisa jadi payung hukum dan justifikasi pemerintah mengawasi forum pengajaran-pengajian", paparnya.

Oleh karena itu, Iskan menambahkan PMA bisa diseleweangkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Hingga berpotensi meningkatkan

kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah sedang melakukan pengawasan ketat kepada kelompok masyarakat yang distigma tidak loyal terhadap penguasa, dan hal ini akan menambah sikap antipati sebagian kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Foto : dpr.go.id

semua stakeholder hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Tapi hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (04/12) — Pemerintah diingatkan kembali untuk mencari solusi-solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah defisit BPJS, bukan justru sibuk saling merumitkan persoalan.

Demikian ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam siaran persnya, Rabu (4/12/2019).

Mufida menyampaikan hal tersebut menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan salah satu penyebab defisit BPJS adalah praktik operasi cesar.

“Bagi komisi IX, yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS,” tandas Mufida.

Mufida melanjutkan, walaupun ada dugaan-dugaan

PKS: 2019 Segera berakhir, Keruwetan BPJS Harus Ada Solusi

seperti membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung dan lain-lain, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan cross check data dan investigasi.

“Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40% atau 2 kali lipat dari standar WHO?” Mufida mempertanyakan.

Perlu dicek juga, apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak dicover BPJS, sehingga diperoleh data yang betul-betul valid.

“Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS, karena banyak jg yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40 %, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan,” tambah Mufida.

Menurut Mufida, semua stakeholder hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Tapi hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.

Mufida mengungkapkan, yang dilakukan Menteri Kesehatan saat rapat terakhir dengan Komisi IX DPR RI sebelumnya sudah fokus, yaitu

akan mengambil langkah-langkah strategis agar defisit BPJS segera teratasi dan kenaikan iuran BPJS kelas 3 tidak terjadi atau dicarikan subsidi dana untuk selisih kenaikannya.

“Misalnya dengan membentuk tim kecil yang membahas secara strategis langkah-langkah mengatasi defisit, mengembalikan fungsi puskesmas, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih ke preventif, promotif, tidak ke kuratif karena ini lebih berpengaruh signifikan pada kualitas kesehatan masyarakat,” papar Mufida.

Karena itu, Mufida mengingatkan pemerintah sebagai regulator dan BPJS sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran.

“Presiden sendiri dari kunjungan beliau ke beberapa tempat mengatakan, perlu perbaikan manajemen di BPJS. Maka mari kita sama-sama menjaga komentar-komentar yang bisa menimbulkan keresahan. Mari ciptakan ketenangan dan beri solusi-solusi jangka pendek. Bangsa butuh jawaban cepat mengatasi persoalan BPJS ini,” tandas Mufida.





Menagih Hak Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas

diantara hak pendidikan para siswa penyandang disabilitas yang masih kerap terabaikan adalah persoalan deteksi dan intervensi dini pada peserta didik. Ragam disabilitas anak didik kadang tidak terdeteksi sejak awal dan berakibat siswa penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kebutuhannya.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (04/12) — Memaknai Hari Disabilitas 3 Desember lalu, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan pemerintah untuk lebih serius mewujudkan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

“Sejak diundangkannya UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, kita memahami ada 22 hak para penyandang disabilitas yang harus kita tegakkan bersama,

diantaranya hak pendidikan. Sayangnya beberapa amanah peraturan turunan terkait pendidikan belum terrealisasi sehingga menghambat pemenuhan hak pendidikan atas siswa penyandang disabilitas.”

Menurut Ledia diantara hak pendidikan para siswa penyandang disabilitas yang masih kerap terabaikan adalah persoalan deteksi dan intervensi dini pada peserta

didik. Ragam disabilitas anak didik kadang tidak terdeteksi sejak awal dan berakibat siswa penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat sesuai kebutuhannya.

“Dalam hal ini, diperlukan kemampuan guru dalam melakukan assessment pada setiap siswa dan memiliki kemampuan dasar untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Apalagi bagi sekolah inklusi. Dengan memahami kondisi setiap siswa utamanya siswa penyandang disabilitas maka langkah pengayoman dan pendampingan kepada mereka akan lebih tepat dan berkesesuaian dengan kebutuhan pencapaian perkembangan siswa.” Urai Ledia

Untuk itu adeg Fraksi PKS ini meminta pemerintah mendorong Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) secara aktif menyediakan program pelatihan dan sosialisasi bagi para guru terkait kemampuan

assessment bagi siswa dan kemampuan dasar pendampingan bagi siswa berkebutuhan khusus.

“Sebab dari rencana pengembangan sekolah inklusi di seluruh Indonesia, faktor utama yang seringkali menghambat proses ajar mengajar pada siswa penyandang disabilitas adalah kekurangan guru yang siap mendampingi para siswa penyandang disabilitas ini. Akibatnya mereka kerap didowgrade kelasnya dalam sistem pengajaran atau orangtua siswa tersebut terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk mendatangkan guru pendamping dari luar sekolah.”

Hal kedua yang juga diingatkan Ledia adalah penyediaan unit layanan disabilitas pada setiap daerah yang belum terlaksana.

“Padahal unit layanan disabilitas ini justru akan sangat membantu sekolah dalam memberikan intervensi yang tepat bagi para siswa penyandang disabilitas. Dengan ragam disabilitas yang tidak seragam pada setiap sekolah bahkan setiap level kelas, adanya unit disabilitas bisa menjadi jembatan penyedia kebutuhan ajar mengajar setiap siswa penyandang disabilitas. Satu sekolah mungkin membutuhkan buku Braille sementara satu sekolah lagi

membutuhkan guru bagi siswa tuli. Semua cukup dipenuhi oleh unit layanan disabilitas setempat.”

Karena itulah maka Ledia kembali mengingatkan Pemerintah untuk sesegera mungkin menurunkan aturan pemerintah terkait pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas

“Saya berharap tahun depan para penyandang disabilitas sudah bisa mendapat kado tahun baru dari Menteri Pendidikan berupa pemenuhan hak-hak pendidikan yang lebih optimal.”



Tanpa Peran **GURU HONOR**

Pendidikan di Indonesia sulit dilaksanakan dengan baik.



Guru honor secara eksistensi sangat dibutuhkan karena jumlahnya sangat signifikan. Ada satu sekolah negeri dengan 20 rombel, dengan jumlah guru 24 orang, yang berstatus ASN hanya 6 orang dan 18 orang lainnya adalah guru honor.

Dr. H. FAHMI ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI



Fahmy Alaydroes Desak Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru Honor



Bogor – Anggota Komisi X DPR RI, Fahmy Alaydroes meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan perhatian terhadap guru honor. Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini nasib guru honor masih sangat miris, meskipun tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa.

“Kami, mendukung perjuangan guru honor yang sudah berkontribusi secara nyata dan lama mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 serta Pasal 31 UUD 1945,” ujarnya, di acara Peringatan

Harlah ke 10 Tahun, Perkumpulan Guru Honor Kabupaten Bogor, Senin Jum’at, (29/11).

Guru honor, Lanjutnya, secara eksistensi juga sangat dibutuhkan karena jumlahnya sangat signifikan. Ada satu sekolah negeri dengan 20 rombel, dengan jumlah guru 24 orang, yang berstatus ASN hanya 6 orang dan 18 orang lainnya adalah guru honor. Karena itu, kata dia, tanpa peran guru honor, pendidikan di Indonesia akan sulit dilaksanakan dengan baik.

Karena jasanya yang besar, selayaknya pemerintah

pusat dan daerah segera merespon, baik berkenaan dengan status dan legalitas maupun kesejahteraan guru honor,” imbuhnya.

Guru Honor yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Honor (PGH) menjadikan ajang pertemuan dengan Anggota DPR RI ini untuk menuangkan segala keluh kesah dan aspirasi mereka. Aspirasi disampaikan secara tertulus.

Ketua PGH Kabupaten Bogor, Halim Sahabudin mengatakan, Pemerintah semestinya memuliakan profesi guru dan memperlakukan guru honor secara layak. Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya memberlakukan Upah Minimum Regional. “Kami menuntut agar UMR diberlakukan untuk guru honor,” pintanya.

Halim meminta agar alokasi dana bos 40 persennya untuk guru honor. Selain itu, ia juga meminta ada SK Bupati Bogor untuk menguatkan status guru honor. “Kami juga menuntut agar ada Perda Pendidikan mengatur gaji guru honor,” tandasnya (*)

Guru honor secara eksistensi juga sangat dibutuhkan karena jumlahnya sangat signifikan. Ada satu sekolah negeri dengan 20 rombel, dengan jumlah guru 24 orang, yang berstatus ASN hanya 6 orang dan 18 orang lainnya adalah guru honor. Karena itu, tanpa peran guru honor, pendidikan di Indonesia akan sulit dilaksanakan dengan baik.

**Dr. H. FAHMI
ALAYDROES,
MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI
Dapil Kabupaten Bogor



“Pembengkakan utang tidak hanya terjadi pada sektor Pemerintah, tetapi juga pada BUMN dan Swasta. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin rentan

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (03/12) — Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menyoroti semakin membengkaknya utang pada multisektor di Indonesia.

“Pembengkakan utang tidak hanya terjadi pada sektor Pemerintah, tetapi juga pada BUMN dan Swasta. Hal ini membuat perekonomian Indonesia menjadi semakin rentan,” kata Ecky di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ecky mengatakan defisit per Oktober melesar menjadi Rp 289 Triliun, atau meningkat 22% apabila dibandingkan realisasi defisit tahun sebelumnya dan hampir menyentuh angka target.

“Dengan masih ada ketubuhan realisasi belanja yang mencapai 28%, maka realisasi defisit dapat membengkak Rp 25-50 Triliun,” tambahnya.

Ecky menyatakan bahwa membengkaknya defisit artinya Pemerintah akan menerbitkan utang baru.

KOMISI XI

Fraksi.pks.id | Selasa 3 Desember 2019

f Fraksi PKS DPR RI

c fraksipksdprri

t @fpksdprri

fraksi.pks.id



PKS: Pemerintah Perlu Waspadai Meledaknya Utang Multisektor

“Utang yang terus menumpuk dan tidak dikelola dengan baik justru dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, serta membuat ekonomi Indonesia rentan akan external shock,” pungkasnya.

Politisi dari Dapil Jawa Barat ini pun mengatakan bahwa, pada sektor lain juga terjadi pembengkakan defisit, seperti sektor BUMN yang mengalami lonjakan Utang Luar Negeri (ULN).

“Utang Luar Negeri BUMN pada September 2019 meningkat 20,4% apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, atau saat ini sudah setara dengan Rp 98 Triliun, hal ini tentu mengkhawatirkan,” papar Ecky.

Ecky mengatakan utang BUMN meningkat tajam salah satunya karena penugasan langsung Pemerintah untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

“Salah satu BUMN kita ada mengalami kenaikan liabilitasnya dari hanya Rp 7 Triliun di tahun 2015, menjadi Rp 53 Triliun di tahun 2018,” ungkapnya.

Ecky mengatakan hal tersebut diperparah dengan meningkatnya debt to asset

ratio yang melonjak dari 58% menjadi 82% pada periode yang sama.

Anggota Fraksi PKS ini pun menilai bahwa utang sektor swasta nasional juga menunjukkan gelagat yang kurang baik.

“Pertumbuhan Utang Luar Negeri sektor swasta nasional non-bank pada kuartal III-2019 mengalami peningkatan sebesar 7% apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Angka tersebut kata Ecky relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan utang swasta nasional non-bank pada kuartal III-2018 yang hanya sebesar 2,6%.

Ecky meminta Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja secara aktif untuk memitigasi sejumlah resiko dengan menggelombungnya utang pada multisektor tersebut.

“Menggelombungnya Utang Pemerintah dan BUMN dapat crowding out utang sektor swasta, yang pada akhirnya akan meningkatkan _cost of capital_ swasta, memperkecil investasi, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin melambat”.

Ecky menyoroti Indonesia



yang belum bisa memaksimalkan potensi pendapatan perpajakan yang ada, sehingga mengalami shortfall pendapatan dan memperlebat defisit.

“Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya hanya sebesar 5,73 persen, sangat jauh apabila dibandingkan pertumbuhan pada periode 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun” tukas Ecky.

Ecky juga meminta kepada

Kementerian Keuangan untuk terus mendorong tax ratio yang selama lima tahun terakhir mengalami stagnansi pada level 10-11%.

Menurutnya stagnansi tax ratio ini disebabkan oleh masih belum jelasnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang dimiliki oleh Pemerintah.

Selengkapnya kunjungi : fraksi.pks.id

PKS: Pemerintah Belum Mampu Menekan Lonjakan Harga Pangan

persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor. Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik

**Ir. H. A. JUNAIDI
AULY, MM**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (04/12) — Rilis inflasi BPS untuk November 2019 menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan (volatile food

inflation) yang jauh di atas jenis inflasi lainnya.

Merujuk data BPS, secara tahunan inflasi umum (headline inflation) mencapai 3 persen pada November 2019, sedangkan inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan/bergejolak 5,02 persen.

Anggota DPR RI FPKS Junaidi Auly, menjelaskan bahwa ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia. Pada November lalu, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam.

"Kami berharap harga pangan bisa lebih stabil, kalau pun ada lonjakan harga tentunya tidak terlalu tinggi sehingga dapat terjangkau." Kata Junaidi Auly dalam rilis diterima Rabu, 4 Desember 2019.

Junaidi menambahkan perlu dicermati bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih

dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya.

"persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor. Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik," ujarnya.

Dalam jangkauan yang lebih jauh, Junaidi mengatakan, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.

"Jadi kalau harga pangan naik terus, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga alokasi dana lain semakin turun. Apalagi bagi masyarakat prasejahtera, hampir 50% dari pendapatannya tersebut untuk kebutuhan pangan. Jadi, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting," tutup Junaidi.





DPR: Pengelolaan dana PMN oleh BUMN belum efektif



Jakarta (03/12) — Pengelolaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang terjadi pada sejumlah BUMN mendapat sorotan Anggota DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati.

Menurut Anis pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN masih belum efektif dan tepat sasaran.

"Saya ingin kita sama2 menyoroti program-program Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat. Apakah sudah tepat atau belum?," tanya Anis pada rapat kerja komisi XI DPR RI dengan

Menteri Keuangan tentang Evaluasi Penyertaan Modal Negara 2019 dan Rencana Penyertaan Modal Negara 2019, Senin, (2/12/2019).

Dalam rapat yang digelar di gedung dewan ini, Anis menjabarkan beberapa fakta dan data yang ditemukannya. Pertama terkait dana PMN yang diberikan kepada PT. Bulog dan PT. PERTANI untuk Program Kedaualatan Pangan yang memiliki dampak langsung dengan kepentingan rakyat.

"Dari data yang disampaikan Menkeu, realisasi dana PMN di Bulog baru sebesar 10 milyar dari total 2

trilyun yang di kucurkan. Serapannya rendah sekali," ujarnya menekankan.

Disisi lain pada 29/11/2019 lalu, Bulog mengatakan akan memusnahkan 20.000 ton beras karena kualitasnya menurun, disebabkan penyimpanan yang lebih dari 1 tahun.

Data Bulog mencatat hingga 13 Mei 2019, stok berasnya mencapai 2,1 juta ton. Stok beras ini sulit disalurkan, karena stok beras di pasar pun sedang melimpah akibat panen raya. Sementara, dengan kondisi gudang yang penuh, Bulog tidak sanggup lagi menyerap beras hasil produksi petani.

"Cadangan beras pemerintah ini tidak bisa diekspor, karena harga yang kita tawarkan akan lebih tinggi dari pada harga luar negeri. Di luar negeri harga beras 6.200 per kg, kita tawarkan 8.000 per kg", urainya.

Dalam kondisi cadangan beras melimpah, kata Anis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pemerintah Indonesia telah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton dengan nilai US\$ 1,03 miliar

Dari data yang disampaikan Menkeu, realisasi dana PMN di Bulog baru sebesar 10 milyar dari total 2 trilyun yang di kucurkan. Serapannya rendah sekali

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si.

Anggota Komisi XI DPR RI

disepanjang tahun 2018. Akhirnya stok beras itu membusuk, sampai di Bulog dibuang-buang, sementara PMN untuk Bulog terus mengucur.

"Dimana efektifitasnya? Lalu, semestinya suntikan dana tersebut dapat menurunkan beras di pasar. Namun nyatanya, beras di pasaran harganya tinggi," tambahnya.

Demikian juga dengan PMN yang dikucurkan kepada PLN, menurut Anis kasusnya hampir sama dengan Bulog. Kucuran dana yang diberikan pemerintah melalui PMN, ternyata tidak bisa juga menurunkan harga tarif listrik. Bahkan tarif listrik malah naik.

Seperti tidak ada korelasinya. Mestinya suntikan dana bisa untuk menurunkan harga, pada PLN misalnya, sudah diberikan bantuan tetapi efeknya tarif listrik malah naik.

Jadi korelasi antara pemberian dengan dampaknya, diksinya kurang nyambung," kata politisi Fraksi PKS ini.

Data ketiga yang dikemukakan Anis terkait dengan kucuran dana untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dana yang dikucurkan pada tahun 2019 sebesar 5 trilyun, sementara data menyebutkan bahwa catatan laba tahun ini sangat rendah. LPEI mencatat laba akhir tahun ini turun 83% dari tahun sebelumnya dimana pada Desember 2018 laba LPEI sebesar 1,01 trilyun sementara akhir tahun ini hanya sebesar 171,67 milyar. NPLnya juga justru meningkat. Jika di bulan Desember 2018 NPLnya sebesar 4,78% di akhir tahun ini meningkat 10,31%.

Selengkapnya di Fraksi.pks.id

HARI ASPIRASI



Aspirasi Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si. dan Anggota Fraksi PKS DPR RI Drs. Chairul Anwar Apt menerima Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia pada Selasa 3 Desember 2019. Bertempat di ruang Aspirasi Fraksi PKS DPR RI, aspirasi membahas pengajuan RUU Kefarmasian.



Aspirasi dari Kesatuan Tour And Travel Umroh dan Haji (Kesthuri)

Ketua dan Anggota Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi dari Aspirasi dari Kesatuan Tour And Travel Umroh Dan Haji (Kesthuri), bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 3 Desember 2019. Aspirasi seputar permohonan peninjauan kembali kebijakan Depag untuk menyeter 20 jt bagi penyelenggara umroh.

Hadir Pada Hari Bumi Sumbar, DPR Ajak Masyarakat Lestarikan Lingkungan



Jakarta (03/12) -- Peringatan Hari Bumi Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Pasaman dihadiri Anggota DPR RI dapil Sumbar II, Hj. Nevi Zuirina.

Peringatan Hari Bumi ini dilakukan sekaligus bersamaan dengan Gerakan Perempuan Menanam tingkat Provinsi Sumatra Barat tahun 2019, dilaksanakan di Taman Hutan Kota (THK) Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Senin (02/12).

Kehadiran Nevi sebagai anggota DPR, juga sekaligus sebagai Ketua TP PKK Sumbar, yang secara bersamaan juga

dihadiri oleh Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Wakil Bupati Atos Pratama, Forkopimda, Sekda Mara Ondak, Ketua TP PKK Kabupaten Pasaman, Ketua Dharma Wanita beserta anggota, asisten, staf ahli, kepala OPD, perwira TNI/POLRI, Camat dan Wali Nagari se-Pasaman.

"Tema hari Bumi kali ini secara Nasional yaitu bersihkan bumi dari sampah plastik. Tema tersebut diangkat berdasarkan bahwa saat ini bumi sedang menghadapi masalah lingkungan yang serius. Dimana terdapat beberapa masalah lingkungan yang

mengkhawatirkan seperti tumpukan sampah plastik memicu bencana banjir dan munculnya berbagai macam penyakit dimasyarakat", kata Nevi.

Nevi Zuirina menambahkan, bahwa persoalan Bumi saat ini adalah persoalan perubahan iklim global, pengelolaan limbah, kelangkaan air, ledakan penduduk, menipisnya sumber daya alam, kepunahan hewan dan tumbuhan.

"Saat ini semua fenomena sudah tampak dihadapan kita adanya kerusakan habitat alam, peningkatan polusi dan meluasnya kemiskinan. Sementara kegiatan kita diatas bumi ini sangat bergantung pada lingkungan. Hal itu disebabkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup berasal dari lingkungan," tegasnya.

Legislator Sumbar ini menerangkan bahwa tujuan peringatan Hari Bumi yang dilaksanakan kesemantan itu adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat agar bisa melihara bumi sebagai tempat hidup dan berkehidupan dengan cara antara lain,

Saat ini semua fenomena sudah tampak dihadapan kita adanya kerusakan habitat alam, peningkatan polusi dan meluasnya kemiskinan. Sementara kegiatan kita diatas bumi ini sangat bergantung pada lingkungan. Hal itu disebabkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup berasal dari lingkungan,

Hj. NEVI ZUIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI
Dapil Sumatera Barat II

berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan terutama pencemaran dari sampah plastik, serta menghijaukan bumi dengan menanam pohon-pohonan.

"Sebagai kita ketahui, pada tahun 2005, kita menduduki penghasil sampah terbesar di dunia. Sedangkan 2019 ini, khusus sampah plastik yang mengotori pantai dan laut, Indonesia menyumbang terbesar kedua setelah China", ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Nevi juga menyerahkan bantuan

berbagai jenis bibit tanaman buah-buahan sebanyak 6.910 batang, kepada Bupati yang kemudian diserahkan ke seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman, yang lokasi tanamnya di pekarangan rumah masyarakat di masing-masing kenagarian.

Selain upacara seremonial, kegiatan hari bumi ditandai dengan penanaman bibit pohon buah-buahan, dimulai Ketua TP PKK Sumbar, bupati dan para pejabat Pasaman lainnya. Dalam kesempatan itu, Ketua TP.PKK provinsi beserta rombongan berkesempatan berkeliling mengitari taman hutan kota, sembari melihat berbagai jenis pohon langka yang ditanam di lokasi tersebut.

PKS: Reuni 212 Momentum Persatuan dan Komitmen Menjaga Merah Putih

“Saya mendorong setiap tanggal 2 Desember di jadikan hari peringatan akan adanya persatuan umat dan kedamaian islam di Indonesia dan seluruh dunia

Dr. MARDANI, M.Eng.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (02/12) — Munajat dan Maulid Akbar Nabi Muhamad SAW sekaligus Reuni Alumni 212 yang berpusat di Kawasan Monas, Jakarta pada tanggal (02/12/2019) berjalan khidmat dan penuh semangat spiritual dan kebangsaan tinggi.

“Reuni Mujahid 212 merupakan salah satu gerakan sosial positif kebangsaan umat islam untuk bersatu dan berkomitmen menjaga merah putih sampai titik darah penghabisan sekaligus mendoakan Presiden Jokowi dan Kiyai Ma’aruf agar menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” kata Mardani di Monas, Senin (02/02).

Anggota Fraksi PKS DPR RI yang juga Alumni 212 ini mengungkapkan, bahwa berkumpulnya masa alumni 212 bukan untuk sesuatu yang

dibanggakan karena pernah menjadi aksi protes damai terbesar di dunia pada (02/12/2016) lalu.

“Tujuan kami berkumpul itu untuk bermunajat kepada Allah SWT, berharap dikabulkan doa kami agar negeri Indonesia dilimpahkan barokah dan penuh rahmat, dan bertepatan juga dalam momentum Mulid nab tercinta Nabi Muhammad SAW,” ujar Mardani.

Selain itu, Mardani mengatakan ada beberapa isu konsern yang ingin disampaikan kepada pemerintah agar di dengar aspirasi umat islam, khususnya alumni 212 yang hadir.

“Salah satunya desakan kepada Presiden Jokowi untuk mempermudah pemulangan Habinina M. Rizqie Sihhab yang saat ini berada di Arab Saudi; selain itu kami juga minta Indonesia lebih proaktif lagi di kancah internasional terkait isu Palestine, Muslim Uighur,

Khasmir, Siriya, dan Islamphobia di negara barat,” kata Ex Ketua tim pemenangan Anis-Sandi.

Anggota DPR RI asal Dapil Jakarta Timur ini juga berharap Reuni 212 sekaligus menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia yang memiliki wajah yang damai, tertib, simpatic dalam menyampaikan aspirasi dan penuh toleransi terhadap perbedaan.

“Alhamdulillah dalam setiap momentum sudah kami tunjukkan masa yang banyak tapi pulang dengan tertib, menjaga kebersihan dari sampah dan kerusakan pada tanaman,” kata Mardani.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu berharap pasca Reuni 212, melahirkan suatu resolusi perjuangan bersama dan kolaborasi untuk berjuang menjaga merah putih kedepannya menuju Indonesia berlimpah berkah dan rahmat.

“Saya mendorong setiap tanggal 2 Desember di jadikan hari peringatan akan adanya persatuan umat dan kedamaian islam di Indonesia dan seluruh dunia,” pungkasnya.

Foto : dpr.go.id



Pemerintah Disarankan tak Hanya Sibuk Isu Radikalisme

Jangan membuat program-program yang tidak ada dalam janji kampanye. Radikalisme tidak ada loh dalam janji kampanye. Tapi sekarang seolah-olah ini kabinet anti radikalisme

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA

Wakil Ketua MPR RI

PADANG – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyarankan pemerintah sebaiknya fokus memenuhi janji-janji yang dilontarkan di masa kampanye. HNW heran di awal-awal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan, pemerintah malah sibuk mengurus radikalisme yang tidak pernah dijanjikan selama kampanye.

"Jangan membuat program-program yang tidak ada dalam janji kampanye. Radikalisme tidak ada loh dalam janji kampanye. Tapi sekarang seolah-olah ini kabinet anti radikalisme," kata Hidayat usai menghadiri pembukaan Silaknas ICMI di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jumat (6/12).

Isu radikalisme yang terus digiring pemerintah menurut politikus PKS tersebut telah membuat situasi tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Terlebih dalam memberantas radikalisme, pemerintah tidak memiliki standar yang jelas.

ahkan pemerintah tidak punya batasan yang jelas mengenai radikalisme.

"Hendaknya radikalisme ada batasan yang jelas, rujukan hukumnya apa," ucap Hidayat.

Hidayat menyayangkan isu radikalisme yang digiring pemerintah justru berakibat pada umat Islam di bawah. "Jangan hanya menggiring narasi radikalisme ke umat Islam saja," kata HNW menambahkan.

Secara terpisah, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memberikan peranan membantu pemerintah memberantas radikalisme.

Ma'ruf menyebut radikalisme menjadi prioritas pemerintah unutm diberantas karena ia menilai Indonesia kini dalam ancaman masuknya paham-paham menyimpang yang membahayakan keutuhan NKRI.

"Saya memandang ICMI harus punya peranan memberantas radikalisme," kata Ma'ruf pada di acara Silaknas ICMI ke 29 di Auditorium Universitas Negeri Padang, Jumat (6/12).

Ma'ruf menyebut ICMI yang berisikan tokoh-tokoh cerdas pandang harus memberikan pencerahan kepada umat dan bangsa agar cerdas dalam menangkal pengaruh paham radikal.





DPR Tingkatkan Kerja Sama 'People To People' Dengan Ethiopia

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani menerima kunjungan Ethiopian Ambassador to Indonesia Admasu Tsegaye, dalam rangka kunjungan kehormatan balasan dari Ethiopia, usai bulan September 2019 yang lalu delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi negara yang terletak di benua Afrika Timur itu. Secara khusus, Mardani mengungkapkan, pada pertemuan tersebut membahas lebih lanjut beberapa informal kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas saat kunjungan delegasi BKSAP ke Ethiopia.

"Kami sangat gembira

kedatangan Dubes Ethiopia Admasu Tsegaye bersama delegasi. Karena mengingatkan kepada BKSAP saat mengunjungi Ethiopia pada bulan September 2019 yang lalu. Kami diterima dengan sangat baik sampai tercapai kepada beberapa informal kesepakatan. Mulai dari mengusahakan beasiswa pelajar Ethiopia ke Indonesia, kerja sama people to people, civil society to civil society sampai pembangunan masjid di salah satu Provinsi di Ethiopia," kata Mardani usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

RDPU Komisi IX



Komisi IX DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terkait penjelasan situasi terkini penyakit Tuberkulosis di Indonesia serta membahas dampak Perpres 75 tahun 2019 tentang Perubahan Perpres 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selasa, 3 Desember 2019

Kunker BURT



Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin bersama Tim Kunker BURT DPR RI menggelar pertemuan dengan Direksi serta jajaran Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang dilanjutkan dengan tinjauan lapangan, Jum'at (6/12)

RDP dengan BSN



Komisi VI DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BSN

membahas Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan Target Penyelesaian Road Map Kementerian/Lembaga. Anggota FPKS Amin AK dan Nevi Zuurina hadir dalam agenda ini. Rabu 4 Desember 2019

RDPU Komisi VIII



Komisi VIII DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen PHU Kemenag dan Para Kepala UPT Asrama Haji membahas Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 serta permasalahan yang dihadapi, Rabu, 4 Desember 2019

Kunker Komisi V



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan infrastruktur dan transportasi angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kamis, 5 Desember 2019.

Tinjau KUR Di Palembang



Anggota Komisi XI Junaidi Auly bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI meninjau implementasi distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh seluruh Bank-Bank BUMN di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 6 Desember 2019.

Tinjau Pembangunan di Balikpapan



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan dengan Angka Pura I, Pelindo IV, Jasa Marga dan PLN, di Balikpapan, Kalimantan Timur, membahas perkembangan persiapan infrastruktur yang dibangun oleh BUMN, Kamis, 5 Desember 2019.



RAPAT KERJA PIMPINAN FRAKSI PKS SE INDONESIA

Kick off Melayani Rakyat
Jakarta 4-5 Desember 2019

BERITA FOTO

Pembukaan Raker Pimpinan Fraksi PKS Se Indonesia

Jakarta - Fraksi PKS DPR RI beserta jajaran Fraksi PKS DPRD seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 4-5 Desember 2019 di Hotel Sahid Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini yang juga koordinator Fraksi PKS seluruh Indonesia ini menyatakan bahwa Rapat Kerja Nasional ini bertujuan menyamakan langkah Fraksi PKS untuk mengokohkan dan meningkatkan produktivitas dewan pusat hingga daerah untuk kepentingan rakyat.



Pidato Politik Presiden PKS



Jakarta - Presiden PKS Mohamad Sohlibul Iman memberikan pidato politik dihadapan para pimpinan Fraksi PKS se Indonesia dalam rangka Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan pada 5 Desember 2019 di Grand Sahid Jaya Jakarta.

Dalam pidatonya Presiden PKS berpesan bahwa Aleg PKS adalah etalase terluar PKS bersama dengan kepala daerah kader PKS. Setiap langkah dan kinerja anggota dewan dinilai sebagai langkah dan kinerja PKS.

PKS Ajukan RUU Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama ke Baleg DPR



RUU perlindungan ulama dan tokoh agama diajukan ke Baleg untuk dibahas agar ulama-ulama di Indonesia bisa dihormati dan dilindungi. Tokoh agama, ulama di Indonesia ini bisa dihormati dan dimuliakan

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menyatakan partainya telah mengajukan atau merevisi sejumlah rancangan undang-undang (RUU), ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk masuk dalam Prolegnas. Seperti salah satunya mengenai usulan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama.

"Fraksi PKS mengajukan atau merevisi sejumlah aturan

yaitu tentang perlindungan ulama dan tokoh agama," ujar Jazuli kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Jazuli menerangkan, RUU perlindungan ulama dan tokoh agama diajukan ke Baleg untuk dibahas agar ulama-ulama di Indonesia bisa dihormati dan dilindungi.

"Tokoh agama, ulama di Indonesia ini bisa dihormati dan dimuliakan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas membenarkan bila PKS telah mengusulkan RUU perlindungan ulama dan tokoh agama. Namun belum diputuskan usulan tersebut apakah akan masuk dalam prolegnas atau tidak.

"Ada yang mengusulkan, PKS usulkan itu tapi belum

diputuskan," jelas Supratman.

Supratman menerangkan, masuk atau tidaknya RUU perlindungan ulama dan tokoh agama bakal diputuskan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang dilakukan secara tertutup.

"Nanti dalam rapat Panja segera diputuskan masuk prolegnas atau tidak," kata Supratman.



Targetkan Raih 150 Kursi, Ini Jurus PKS di Pemilu 2024



**RAPAT KERJA
PIMPINAN FRAKSI PKS
SE INDONESIA**

Kedch Melayani Rakyat
Jakarta 4-5 Desember 2019



Alhamdulillah dengan pertolongan Allah uangnya merangkak-merangkak...tapi inilah pengorbanan. Pengorbanan untuk kejayaan, kebaikan, pengorbanan untuk kebesaran dakwah,"

"Kalau tidak sampai 150, palingan melesetnya hanya 125 kursi," kata Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam Rakernas PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Dia mengungkapkan, di antara jurus demi mencapai target itu adalah kader PKS harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satunya dengan berpuasa Senin dan Kamis.

"Kita anjuran puasa ini di pusat. Kita berharap di daerah juga begitu, kita anjurkan puasa. Kemudian kita akhiri dengan Al Matsu'rat (dzikir pagi dan petang), kemudian (shalat) jamai," kata Jazuli.

Menurut dia, pertolongan terbesar adalah datang dari Allah. Jazuli mencontohkan ihwal dana yang dimiliki oleh PKS. Menurut dia jika dibandingkan dengan partai lain, dana PKS tidak seberapa.

"Tetapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah uangnya merangkak-merangkak...tapi inilah pengorbanan. Pengorbanan untuk kejayaan, kebaikan, pengorbanan untuk kebesaran dakwah," kata dia.

Sebelumnya PKS menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Rakernas dihadiri oleh para petinggi partai yang memilih jalur oposisi itu. Seperti, Jazuli Juwaini, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi Ledia Hanifa, Hidayat Nurwahid dan lainnya.

Kedatangan para petinggi PKS dalam Rakernas tersebut disambut tari tradisional Didong. Tari Didong merupakan tari khas Gayo Aceh. Di daerah asalnya tari ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, fraksi PKS di DPR begitu luas bisa dalam bekerja.

Menurutnya, hanya dalam beberapa bulan saja PKS nampak kinerja positifnya.

Misalnya beberapa Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh PKS diterima dalam Baleg.

"Alhamdulillah meskipun lima tahun yang lalu belum selesai UU Kewirausahaan Nasional. Dan saya juga mendengar sudah dimasukkan Undang-Undang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama," kata dia di lokasi, Rabu (4/12/2019).

Menurut Jazuli, RUU tersebut merupakan janji yang disuarakan oleh PKS selama masa kampanye lalu.

Menurutnya, bagi PKS lewat UU tersebut ulama di Indonesia bisa dihormati dan dilindungi.

"Tokoh agama, ulama di Indonesia ini bisa dihormati dan dimuliakan. Karena mereka juga dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW," ucapnya.

Acara Rakernas ini diagendakan digelar hingga Kamis (5/12/2019). Pada Kamis, Presiden PKS Sohibus Iman dijadwalkan akan memberikan arahan kepada para peserta Rakernas.

Reporter: Rizki Putra Aslendra

**Dr. H. JAZULI
JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Dukung Gerakan Tanpa Plastik, Peserta Rakernas PKS pamer Thumbler

Jakarta (06/12) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Indonesia menggelar Rapat kerja nasional (Rakernas) pada tanggal 4 dan 5 Desember di Grand Sahid Jaya hotel Jakarta. Ada pemandangan menarik dimana semua peserta mendapatkan Thumbler untuk digunakan saat minum.

Ketua Pengarah Rakernas Ledia Hanifa yang juga sekretaris Fraksi PKS DPR RI

Ledia Hanifa mengatakan gerakan tanpa plastik merupakan gerakan sadar lingkungan dan merupakan gerakan internasional yang harus di gemakan.

“Fraksi PKS harus menjadi contoh bagi masyarakat, fraksi PKS harus terdepan mengkampanyekan hal ini,” ujarnya.

Plastik merupakan sampah yang paling banyak

terdapat di sekitar kita dan sulit di daur ulang karena membutuhkan waktu yang lama. Bahkan Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia.

“Perlu ada solusi dan kesadaran kolektif dari setiap pihak menekan angka sampah plastik, PKS mendukung gerakan ini dan mendorong

terus dikampanyekan” ujar ledia.

Fraksi PKS melakukan kampanye ramah lingkungan dengan membagikan ke semua peserta tumbler berlogo PKS. Gerakan ini disambut antusias juga oleh peserta yang hadir, salah satunya Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulsel Sri Rahmi.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap alam, selain juga memakai tumbler lebih sehat daripada plastik. Kalau bukan kita yang mulai siapa lagi?” kata Sri Rahmi.



**RAPAT KERJA
PIMPINAN FRAKSI PKS
SE INDONESIA**

K dch Melayani Rakyat
Jakarta 4-5 Desember 2019

Perlu ada solusi dan kesadaran kolektif dari setiap pihak menekan angka sampah plastik, PKS mendukung gerakan ini dan mendorong terus dikampanyekan

**Hj. LEDIA HANIFA
A, S.Si., M.Psi.T**

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



PROFIL

Hj. NEVI ZUAIRINA

Kali ini kita akan menyapa Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II Hj. Nevi Zuairina, lahir 20 September 1965.

Pada tahun 1985, Nevi menikah dengan Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat saat ini. Dikaruniaia sepuluh anak, 4 menantu dan plus 8 cucu. Alhamdulillah ditengah kesibukan mendampingi suami yang menjadi orang nomor satu di Sumatra Barat, juga kesibukan sebagai Anggota Parlemen Nevy tak ingin kehilangan peran dalam

mendidik anak. Intensif membangun komunikasi secara rutin.

Ibu yang Hobby berenang, baca Al Quran dan traveling ini ingin putra putrinya mendapatkan pendidikan langsung darinya. Sesibuk apa pun dirinya dan suami berkarier di ruang publik, peran orang tua yang juga punya amanah mendidik dan membesarkan tidak boleh diabaikan.

Nevi melihat kehadiran orang tua yang berperan mendampingi anak- anaknya sangat penting. Nevi menyadari, tanpa peran suami, ia tak akan

mungkin melakukan pendidikan anak seorang diri.

Layaknya pepatah minang Mangaji dari alif, babiland dari aso. Mancancang balandasan, malomek basitumpu.

. Dalam melaksanakan suatu tugas bersama tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri.

Nevi mengaku sangat disiplin mendidik anak-anak jika itu berkaitan dengan ibadah. Mereka selalu mengawali hari dengan shalat Subuh bersama. Soal ibadah, Nevi sangat tegas mendidik anaknya agar tidak melalaikan kewajiban ibadah

Pesan Untuk Keluarga Indonesia :

"Cintailah keluarga dengan sepenuh hati seluas alam semesta sedalam samudera sepanjang masa"

Kunjungi Kanal Sosial Media Hj. Nevi Zuairina

Instagram:
@nevizuairina

Facebook:
Nevi Zuairina



Cintailah keluarga dengan sepenuh hati seluas alam semesta sedalam samudera sepanjang masa"





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id